

## Kata Pengantar

Tak terasa bulan demi bulan berlalu dengan cepat dan kita sudah melalui Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Berkenaan dengan itu, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H kepada semua pembaca yang merayakannya. Di sisi lain, kita tentunya mengetahui peristiwa yang menimpa pendukung utama program REDD+ di Indonesia, Kerajaan Norwegia. Aksi pengeboman dan penembakan pada bulan Juli 2011 di Oslo, Norwegia, tentunya menjadi sebuah pukulan berat bagi dunia, khususnya warga Norwegia. Untuk itu, atas nama keluarga besar UN-REDD Programme Indonesia, kami ingin mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi itu. Kami yakin bangsa Indonesia turut berduka dan bersimpati dengan bangsa Norwegia atas kejadian tersebut.

Sementara itu, berbagai kegiatan telah dilaksanakan beberapa bulan ini sejak pertemuan kita melalui *Newsletter* edisi ketiga. Beberapa di antaranya adalah partisipasi di konferensi internasional tentang pengelolaan hutan (*Forest Land Tenure, Governance and Enterprise*, Mataram, Lombok, Juli 2011), pelatihan penginderaan jauh atau *remote sensing* (Palu, Juni – Juli 2011), sinkronisasi rencana kerja UN-REDD Programme Indonesia dengan Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah (Palu, Juni 2011), pelatihan alat pendukung kebijakan REDD+ di Cambridge, Inggris (Juli 2011), dan lain sebagainya. Para pembaca dapat mengikuti ringkasan peristiwa kegiatan-kegiatan tersebut di *Newsletter* edisi keempat ini. Kami berharap semua upaya ini membuahkan hasil yang berarti bagi persiapan dan pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Sekali lagi, selamat mengikuti kegiatan-kegiatan kami melalui sarana komunikasi ini.



**Yuyu Rahayu**  
National Programme Director

## UN-REDD Programme Indonesia dan Strategi Komunikasi REDD+

Untuk memastikan tercapainya tujuan persiapan dan implementasi REDD+ di Indonesia, UN-REDD Programme Indonesia mengembangkan strategi komunikasi yang lebih baik. Melalui konsultasi dengan konsultan komunikasi internasional, Mr. Jonathan Wootliff, strategi komunikasi ini diharapkan nantinya dapat dipakai oleh UN-REDD Programme Indonesia dan mitra-mitranya dalam mendukung semua pemangku kepentingan mewujudkan kesuksesan REDD+.

**D**irektorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumberdaya Hutan Kementerian Kehutanan RI selaku Executing Agency UN-REDD Programme Indonesia mengugaskan konsultan tersebut untuk melakukan pertemuan dengan beberapa pemangku kepentingan di Jakarta maupun di Palu, Sulawesi Tengah, (yang merupakan provinsi percontohan UN-REDD Programme Indonesia).

Pertemuan konsultasi itu bertujuan bertukar pikiran dan mengumpulkan data yang dapat memperkaya pengembangan strategi komunikasi dimaksud. Hasil konsultasi kemudian diolah menjadi proposal awal yang kemudian dibahas di diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*). Diharapkan strategi komunikasi ini dapat segera berjalan untuk mensukseskan REDD+ di Indonesia.



Konsultan Komunikasi Internasional, Jonathan Wootliff, dengan beberapa perwakilan media di Palu.



Suasana diskusi dengan masyarakat adat Salua, Kabupaten Sigi.



Jonathan Wootliff disambut oleh masyarakat Salua dengan cara adat; menerima topi dan badiuk.



Ir. H. Nahardi, MM, Kepala Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, menyalami Konsultan Komunikasi Internasional setelah memberi masukannya untuk strategi komunikasi REDD+.

## Daftar Isi

|   |   |  |   |   |    |
|---|---|--|---|---|----|
| Kata Pengantar .....  | 1 | Gubernur Sulawesi Tengah Sambut Baik UN-REDD Programme Indonesia .....                       | 4 | Konferensi Perubahan Iklim Dunia di Bonn .....                                | 8  |
| UN-REDD Programme Indonesia dan Strategi Komunikasi REDD+ .....         | 1 | Sinkronisasi Rencana Kerja REDD+ di Sulawesi Tengah .....                                    | 5 | Keadilan Dalam Perubahan Iklim .....  | 8  |
| <i>Forest Land Tenure, Governance and Enterprise</i> ....               | 2 | <i>Participatory Governance Assessment (PGA)</i> Dalam Implementasi REDD+ di Indonesia ..... | 6 | Pelatihan Penginderaan Jauh .....   | 9  |
| Sistem Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi untuk Program REDD+ .....  | 3 | Sesi Kerja di UNEP-WCMC Cambridge untuk Persiapan Alat Pendukung Kebijakan REDD+ .....       | 7 | Masyarakat Adat Asing Bertemu di Sulawesi Tengah                              | 10 |
| Peta Jalan Sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Kehutanan ..... | 3 |  |   | Indikator Khusus Gender Menjadi Bagian dari UN-REDD Programme Indonesia ..... | 11 |
|   |   |  |   | Kata Mereka .....   | 11 |
|   |   |  |   | Kabar UN-REDD Programme Indonesia .....                                       | 12 |

## Forest Land Tenure, Governance and Enterprise

Sekali lagi, sebuah acara berskala internasional yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim dan kehutanan diselenggarakan di Indonesia. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI), Rights and Resources Initiatives (RRI), dan *The International Tropical Timber Organization (ITTO)* pada pertengahan Juli lalu mengadakan acara bertajuk *The International Conference on Forest Land Tenure, Governance and Enterprise: Experiences and Opportunities for Asia in a Changing Context* di Mataram, Lombok (11 – 15 Juli 2011). Acara konferensi sekaligus pameran yang dilanjutkan dengan *field visit* itu dihadiri oleh semua pemangku kepentingan, dari masyarakat adat, pemerintah, swasta, hingga media. Indonesia merupakan negara yang ideal untuk menjadi tuan rumah acara ini, karena Indonesia memiliki lahan, populasi, dan kawasan hutan terluas di Asia Tenggara.

Bertujuan saling berbagi pengalaman dan hikmah pembelajaran antar negara dalam mengatasi masalah kurangnya pengelolaan hutan oleh pemerintah dan lemahnya perlindungan hak-hak pengelolaan sumber alam, acara ini padat diisi dengan presentasi dan diskusi panel. Pada acara ini UN-REDD Programme Indonesia berpartisipasi dengan mengirim anggota Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah untuk mengikuti konferensi, juga dengan mengisi pameran bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan RI.

Pada hari keempat, peserta melakukan kunjungan lapangan ke Taman Nasional Gunung Rinjani. Bisa diambil hikmah pembelajaran dari kunjungan tersebut bahwa kerja sama antara Taman Nasional dan anggota masyarakat yang tinggal di sekitarnya berhasil menjaga kelestarian alam di sana. Salah satu bentuk kerja sama itu adalah penyediaan jasa wisata alam. Hal serupa terjadi di Hutan Adat Mantong



▲ Wakil Presiden RI, Dr. Boediono, membuka konferensi



▲ Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan, menyampaikan pidato

Gedeng yang juga dikunjungi peserta konferensi. Masyarakat sekitar memelihara dan melindungi hutan adat itu. Manfaat dari upaya tersebut adalah alam sekitar masyarakat terpelihara tanpa khawatir gangguan bencana hutan, sementara masyarakat sendiri mendapat keuntungan ekonomi dari wisata alam.



◀ Peserta internasional mendapat sambutan adat dari masyarakat Lombok



▲ Bapak Hedar Laudjeng memberikan pidato sebagai Ketua Kamar Masyarakat, Dewan Kehutanan Nasional.

◀ Ir. Indriastuti, M.M, Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM Kehutanan (kanan), mengunjungi stan UN-REDD Programme Indonesia.

## Sistem Pemantauan, Pelaporan, dan Verifikasi untuk Program REDD+

Berdasarkan permintaan Satuan Tugas REDD+, Food Agriculture Organization (FAO) bersama UN-REDD Programme Indonesia telah menyelesaikan sebuah rekomendasi "Informasi, Monitoring, dan MRV (*Measurement, Reporting and Verification*) untuk REDD+ di Indonesia". Rekomendasi ini disusun berdasarkan (1) keputusan Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties* atau COP) di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC); (2) petunjuk dan pedoman Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC); (3) beberapa program REDD+ di Indonesia seperti *Letter of Intent* (LoI) antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia; (4) kebijakan dan mandat Pemerintah; serta (5) pengalaman pembelajaran program REDD+ di beberapa negara.

Fokus dari rekomendasi ini mengikuti keputusan COP ke-16 di Cancún, dan menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Keputusan tersebut menyatakan bahwa implementasi REDD+ dilaksanakan dalam 3 fase, dan komponen-komponen yang berbeda dari REDD+ akan dilaksanakan dalam fase-fase yang berbeda. Indonesia pada saat ini berada di Fase 2 atau kesiapan (*readiness*). Masih berdasarkan keputusan tersebut, di Fase 2 Indonesia diharuskan untuk membangun sistem



▲ Presentasi rekomendasi MRV oleh Dr. Joel Scriven

informasi perlindungan REDD+ dan sistem pemantauan. Sistem pemantauan dan MRV secara keseluruhan harus dilaksanakan di Fase 3. Rekomendasi yang berkaitan dengan MRV itu telah dipresentasikan kepada para pihak (a.l: Satuan Tugas REDD+ Nasional/UKP4, Kementerian Kehutanan, Dewan Nasional Perubahan Iklim, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Badan Koordinasi Survei dan

Pemetaan Nasional) oleh Dr. Danilo Mollicone, Senior Forestry Officer dan Dr. Joel Scriven, Forestry Officer dari Kantor Pusat FAO di Roma (Italia), juga Rogier Klaver dari FAO Jakarta, pada tanggal 21 - 23 Juni 2011. Rekomendasi ini bertujuan memberikan masukan bagi pembangunan sistem MRV untuk program REDD+ di Indonesia. Setiap sistem akan berbagi komponen umum, yaitu sistem pemantauan satelit.

## Peta Jalan Sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Kehutanan

Salah satu tujuan UN-REDD Programme Indonesia adalah meningkatkan kapasitas dan desain metodologi untuk inventarisasi karbon hutan dalam sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (*Measurement, Reporting, and Verification* atau MRV), di tingkat nasional maupun sub nasional.

Untuk menuju pelaksanaan MRV REDD+, saat ini sedang dirangkum peta jalan (*road map*) MRV Kehutanan yang

dikoordinasi oleh Prof. Dr. Ir. I Nengah Surati Jaya dan Dr. M. Buce Saleh Wiranatakusumah dari Institut Pertanian Bogor. Penyusunan *road map* kehutanan ini berlandaskan masukan dari pihak terkait dan telah melalui empat kali diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion* atau FGD). Selain itu, telah diadakan juga lokakarya di Hotel Braja Mustika, Bogor, pada tanggal 4 Agustus



▲ dari kiri ke kanan: Dr. Machfudh (UN-REDD Programme Indonesia), Dr. M. Buce Saleh Wiranatakusumah (IPB), Ir. Yuyu Rahayu, Msc. (UN-REDD Programme Indonesia)

2011. Pada saat ini penyusunan *road map* sudah mencapai Draf 1 dan masih dalam tahap penyempurnaan oleh tim penulis.

## Gubernur Sulawesi Tengah Sambut Baik UN-REDD Programme Indonesia

UN-REDD Programme Indonesia bersama Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, UNDP Indonesia, juga anggota panel ahli Participatory Governance Assessment (PGA) untuk Implementasi REDD+ di Indonesia melakukan pertemuan dengan Bapak Longki Djanggola, Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah yang baru pada hari Sabtu, 29 Juli 2011 di kota Palu.



▲ Gubernur Sulteng berjabat tangan dengan Irman Lanti, Interim Head, Governance Unit, UNDP Indonesia

Pada pertemuan tersebut Bapak Yuyu Rahayu selaku National Programme Director UN-REDD Programme Indonesia, didampingi Ketua Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah, Ir. Nahardi, menjelaskan tentang UN-REDD Programme Indonesia serta sejumlah capaian kegiatannya di Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satunya adalah pembentukan Pokja REDD+ Sulawesi Tengah yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk perwakilan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Selain itu, setiap Sub Pokja telah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti penyusunan Strategi Daerah REDD+ Sulawesi Tengah. Pada pertemuan ini juga, UN-REDD Programme Indonesia menyampaikan laporan kemajuan kegiatan UN-REDD Programme Indonesia dalam bentuk buku dan beberapa publikasi utama lainnya kepada Gubernur.



▲ Gubernur menyimak penjelasan dari NPD UN-REDD Programme Indonesia, Ir. Yuyu Rahayu, dan Kepala Dinas Kehutanan Sulteng, Ir. Nahardi



▲ Gubernur Sulawesi Tengah menyambut baik laporan dari UN-REDD Programme Indonesia

Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah menyambut baik kegiatan UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah, terutama karena upayanya menanggulangi deforestasi dan degradasi hutan. Beliau menyampaikan bahwa upaya penanggulangan deforestasi dan degradasi hutan di Sulawesi Tengah memang tidak mudah, disebabkan masih banyaknya tumpang tindih klaim kepemilikan, contohnya saja antara masyarakat dan pemerintah. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah juga mengharapkan pertemuan teratur dengan UN-REDD Programme Indonesia untuk mendapatkan informasi perkembangan kegiatan UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah, serta membahas tantangan-tantangan yang ditemukan di lapangan.

## Sinkronisasi Rencana Kerja REDD+ di Sulawesi Tengah

Sebagai bagian dari koordinasi antara Programme Management Unit (PMU) UN-REDD Programme Indonesia, Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kehutanan Sulawesi Tengah, diadakan konsolidasi dan sinkronisasi rencana kerja UN-REDD Programme Indonesia dengan rencana kerja Pokja dan UPT (Jakarta, 24 Juni 2011). Kegiatan ini diikuti juga oleh 20 anggota Pokja yang merupakan perwakilan dari Dinas Kehutanan Daerah Sulawesi Tengah, perwakilan Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tengah, perguruan tinggi, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), perwakilan masyarakat adat dan lokal, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta unit-unit pelaksana teknis (UPT) kehutanan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah.

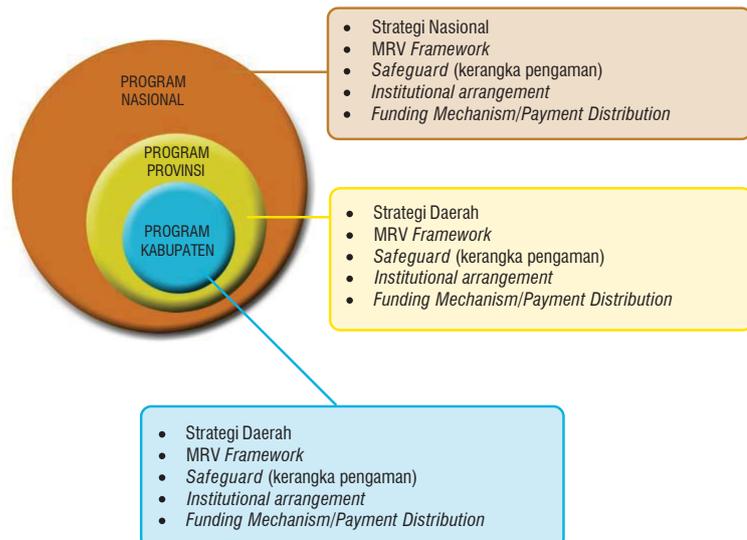


Ir. Nahardi membuka acara selaku Ketua Pokja REDD+ Sulawesi Tengah

Topik-topik bahasan koordinasi mencakup materi tentang UN-REDD Programme Indonesia, komponen-komponen kesiapan (*readiness*) REDD+, serta kegiatan dan target di Sulawesi Tengah. Kepala Dinas Kehutanan Daerah Sulawesi Tengah, Ir. Nahardi, sebagai Ketua Pokja REDD+ Sulawesi Tengah menghargai kegiatan sinkronisasi sebagai suatu kebutuhan agar kesepahaman tetap terjaga di antara PMU UN-REDD Programme Indonesia, Pokja REDD+ Sulawesi Tengah, dan UPT. Ir. Yuyu Rahayu, selaku National Programme Director (NPD) UN-REDD Programme Indonesia mengingatkan kembali bahwa kegiatan-kegiatan di Sulawesi Tengah adalah membangun kesiapan REDD+, yang ditandai dengan adanya arahan dan kerangka: strategi, kelembagaan, mekanisme pembayaran-distribusi manfaat, dan kerangka pengaman (*safeguards*). Ir. Yuyu Rahayu menekankan bahwa aktivitas di Sulawesi Tengah pada saat ini menggambarkan “national

*approach, sub-national implementation”* (pendekatan nasional, implementasi sub-nasional), yang memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa

dengan pendekatan ini Sulawesi Tengah mampu mencapai kesiapan untuk implementasi REDD+.



## Participatory Governance Assessment (PGA) Dalam Implementasi REDD+ di Indonesia

UN-REDD Global Programme melalui Unit Tata Kelola United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia bekerja sama dengan UN-REDD Programme Indonesia akan melaksanakan kegiatan *Participatory Governance Assessment* (PGA atau Penilaian Tata Kelola yang Melibatkan Partisipasi) untuk implementasi REDD+ di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan melihat sejauh mana Indonesia siap melaksanakan kegiatan REDD+ baik di tingkat nasional maupun sub nasional dari aspek tata kelola. Hal ini menjadi sangat relevan karena hasil konsultasi Strategi Nasional REDD+ yang dikoordinasi oleh BAPPENAS dengan dukungan utama UN-REDD Programme Indonesia di tujuh wilayah menunjukkan bahwa salah satu akar masalah implementasi REDD+ adalah lemahnya tata kelola hutan dan penegakan hukum terkait isu tata kelola. Selain itu, dibutuhkan penilaian menyeluruh dan terukur atas tata kelola di tingkat nasional dan sub nasional untuk menghindari konflik dan kerugian yang cukup besar bagi warga dan negara akibat buruknya tata kelola REDD+.

Penilaian ini menjadi penting karena salah satu kesepakatan the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Cancún (Meksiko, 2010), menetapkan semua negara yang berpartisipasi dalam kegiatan REDD+ untuk mengembangkan serangkaian *safeguards* (kerangka pelindung/pengaman) dan memastikan *safeguards* itu menjadi bagian dari sistem Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (*Measurement, Reporting and Verification* atau MRV).



▲ Kegiatan Konsultasi Publik Draft Desain PGA untuk REDD+ di Palu, Sulawesi Tengah, 29 Juli 2011

Salah satu kerangka pelindung tersebut adalah tata kelola hutan.

Saat ini, anggota panel ahli yang terdiri dari Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo (Insitut Pertanian Bogor), Prof. Dr. Sofian Effendi (Universitas Gadjah Mada), Mas Achmad Santosa SH, LLM (UNDP), Dr. Sunaryo (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia), Dr. Myrna Safitri (Epistema Institute), Ir. Abdon Nababan (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dan Josi Katarina SH, LLM (Indonesian Center for Environmental Law) dengan dukungan Project Management Unit PGA untuk REDD+ telah berhasil menyusun draf

indikator PGA untuk REDD+. Draft indikator PGA untuk REDD+ ini telah dikonsultasikan kepada para pemangku kepentingan di Pekanbaru, Riau, pada tanggal 22 Juli 2011 dan Palu, Sulawesi Tengah, pada tanggal 29 Juli 2011.

Kegiatan PGA untuk REDD+ ini akan dilaksanakan di sepuluh provinsi, yaitu Aceh, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua dan Papua Barat. Rencananya, pengumpulan data akan dilakukan pada bulan November 2011 dan seluruh kegiatan diharapkan rampung pada bulan Maret 2012.



▲ Peserta kegiatan PGA di Palu berfoto bersama setelah acara

## Sesi Kerja di UNEP-WCMC Cambridge untuk Persiapan Alat Pendukung Kebijakan REDD+

Sebagai bagian dari kerja sama UN-REDD Programme Indonesia dengan United Nations Environment Programme - World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) dalam pengembangan *toolkit* memaksimalkan manfaat potensi karbon (co-benefit), diadakan sesi kerja tentang karbon dan alat pendukung kebijakan REDD+. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11-22 Juli 2011, di kantor UNEP-WCMC, Cambridge, Inggris. Tim dari Indonesia yang menjadi peserta dalam kegiatan ini adalah Hasbi Afkar (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Palu), Henry Barus (Universitas Tadulako, Palu), Judin Purwanto (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia), dan Adi Setyawan (Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah).

Sesi kerja ini bertujuan memulai pekerjaan bersama dalam pembuatan peta-peta dan analisa statistik sebagai informasi tentang hubungan antara karbon dan keuntungan ganda (*multiple benefits*). Tujuan lainnya adalah menyusun opsi-opsi untuk alat lain yang dapat digabungkan dengan *toolkit* penetapan prioritas untuk pelaksanaan REDD+ di Indonesia, terutama di Sulawesi Tengah.



▲ "Dari kiri ke kanan: Barney Dickson (UNEP), Monika Bertzky (UNEP-WCMC), Adi Setyawan (Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah), Hasbi Afkar (Balai Pemantapan Kawasan Hutan)"

Aplikasi pemetaan dan statistik atas berbagai data di provinsi Sulawesi Tengah sudah dilakukan. Kemudian dilakukan juga diskusi tentang alat pendukung kebijakan (*decision support tool*) dan kebutuhan para pemangku kepentingan di Sulawesi Tengah untuk pengambilan keputusan di tingkat provinsi serta kabupaten.

Untuk ke depannya, langkah yang sudah disepakati adalah melakukan

kolaborasi dan penyelesaian peta-peta. Selain itu, UNEP-WCMC akan menyiapkan berbagai usulan untuk elemen-elemen *toolkit* yang kemudian akan dibahas dengan Programme Management Unit (PMU) UN-REDD Programme Indonesia dan UNEP. UNEP-WCMC akan melanjutkan misinya ke Jakarta and Palu untuk membicarakan hasil

sesi kerja dan langkah penyelesaian *toolkit* dengan PMU dan Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah tahun ini (10 – 14 Oktober 2011 atau 7 – 11 November 2011).

## Konferensi Perubahan Iklim Dunia di Bonn

Pada UN Climate Change Conference yang diselenggarakan tanggal 6 - 17 Juni 2011 di Bonn, Jerman, UN-REDD Programme Indonesia turut berpartisipasi sebagai anggota Delegasi Republik Indonesia (RI). Dr. Yetti Rusli, Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim dan Lingkungan, yang sekaligus merupakan Ketua Pokja Perubahan Iklim Kementerian Kehutanan, memimpin Delegasi Kehutanan RI. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Delegasi Kehutanan mengawal isu-isu terkait REDD+ serta Penggunaan Lahan, Pengalihan Lahan, dan Kehutanan (*Land use, Land-use Change and Forestry* atau LULUCF).

Pembicaraan REDD+ dilakukan di dua forum, yaitu dalam forum bentukan the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang bertugas memberi masukan dan informasi



▲ Suasana konferensi di Bonn, Jerman

tentang sains dan teknologi kepada para Pihak (*Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice* atau SBSTA), dan dalam forum Kelompok Kerja Ad Hoc Mengenai Aksi Kerja Sama Jangka Panjang di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (*Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention* atau AWG-LCA). Dalam forum negosiasi terkait isu REDD+ dalam SBSTA, telah dihasilkan beberapa hal yang menjadi mandat SBSTA, yaitu (1) mengidentifikasi penyebab (*drivers*) deforestasi dan degradasi hutan serta kegiatan LULUCF di negara berkembang yang menghasilkan emisi maupun penyerapan (*removals*); (2) menyiapkan modalitas untuk penetapan Tingkat Emisi Referensi/Tingkat Referensi (*Reference Emissions Level/Reference Level* atau REL/RL) dan untuk pembangunan Sistem

Informasi Hutan (*Forest Information System* atau FIS) dalam rangka pengawasan (*monitoring*) dan pelaporan (*reporting*) aksi REDD+; serta (3) menyiapkan panduan untuk pembangunan sistem penyediaan informasi pelaksanaan kerangka pengaman (*safeguards*) dalam aksi REDD+.

Salah satu keputusan penting terkait LULUCF adalah dibentuknya Tim Peninjau Ahli (*Expert Review Team* atau ERT) yang tugas utamanya mengkaji kembali hasil perhitungan RL untuk pengelolaan hutan di negara-negara maju. Laporan ERT akan menjadi dasar pertimbangan utama para pihak dan sebagai bahan negosiasi untuk mencapai kesepakatan di Konferensi Para Pihak (*Conference of the Parties* ke-17 atau COP 17) di Durban, November – Desember 2011.

## Keadilan Dalam Perubahan Iklim

Perubahan iklim telah menimbulkan efek negatif bagi perekonomian masyarakat Indonesia, di samping menurunkan kualitas lingkungan. Untuk mencegah dampak perubahan iklim lebih lanjut, Indonesia harus melakukan berbagai langkah yang tepat dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebagai upaya untuk memberikan masukan bagi mitigasi perubahan iklim, khususnya yang terkait dengan aspek tata kelola, kerangka hukum, serta mekanisme pertanggungjawaban dalam perubahan iklim, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) bekerja sama dengan UN-REDD Programme Indonesia telah menyelenggarakan Diskusi Pakar dengan tajuk *Toward Climate Justice: Improving Governance, Legal framework, and Liability Aspects of Climate Change in Indonesia*. Acara

ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2011 di Hotel Ambhara, Jakarta, dan dihadiri oleh sekitar 40 peserta dengan menghadirkan beberapa pakar di bidang ini, yaitu Prof. Daniel Murdiyarto (CIFOR), Prof. Dr. Jaap Spier (anggota Mahkamah Agung Belanda), Mas Ahmad Santosa (UNDP-Governance), Iswan Elmi (Komite Pemberantasan Korupsi), Josi Katharina (ICEL), dan Prof. Dr. Faure (Maastricht University). Selain para pakar tersebut, dihadirkan juga tiga orang pembahas, yaitu Dr. Laode Syarif (Universitas Hasanuddin), Dr. Sunaryo (Kementerian Kehutanan Republik Indonesia), dan Sukma Violeta (ICEL).

Beberapa topik menarik dari diskusi pakar ini antara lain perlunya negara-negara berkembang seperti Indonesia menggunakan isu hak asasi manusia dan bukan isu kompensasi

ketika bernegosiasi dengan negara maju. Selain itu, pakar dari Belanda menyatakan bahwa yang banyak mengetahui keadaan kehutanan dan perubahan iklim di Indonesia adalah orang Indonesia, sehingga tidak tepat bila meminta orang dari luar Indonesia menjadi tenaga ahli atau penasihat terkait persiapan REDD+ Indonesia. Topik lain yang dibahas adalah perlunya *safeguards* (kerangka pengaman) terkait dengan tata kelola (*governance*) serta korupsi. Terkait dengan hal itu ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab dalam Strategi Nasional REDD+ yang saat ini sudah berada di meja Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), antara lain apakah REDD+ berkontribusi terhadap reformasi tata kelola hutan di Indonesia? Dan apakah REDD+ dapat bebas dari praktik-praktik korupsi?

## Pelatihan Penginderaan Jauh

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Sulawesi Tengah, khususnya dalam bidang penginderaan jauh, UN-REDD Programme Indonesia bekerja sama dengan Universitas Tadulako menyelenggarakan Pelatihan Penginderaan Jauh Tingkat Dasar yang diikuti oleh 33 peserta dari Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (RI), Badan Perencana Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Badan Registrasi Wilayah Adat, Yayasan Merah Putih, Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu, dan Universitas Al Khairaat Palu. Pelatihan ini diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah, pada tanggal 27 Juni sampai 9 Juli 2011.

Dalam pidato pada acara pembukaan, Pembantu Rektor V Universitas Tadulako, H. Andi Azikin, Msi., menyambut baik dan mendorong kerja sama serta pelibatan universitas dalam kegiatan pembangunan sumber daya manusia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Mempersiapkan sumber daya lokal merupakan unsur penting dalam upaya mensukseskan program Penurunan Emisi akibat Deforestasi dan Degradasi Hutan (*Reducing Emissions from Deforestation & forest Degradation* atau REDD+) yang telah menjadi agenda nasional.

Pengajar berasal dari Balai Pendidikan & Pelatihan, Makassar dan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan RI. Untuk memastikan efektivitasnya, pelatihan ini dibagi antara 40% teori dan 60% praktik, termasuk cek



▲ Peserta berusaha membuat pemetaan sendiri di komputer setelah mendapat teori

lapangan (*ground check*). *Ground check* ini bertujuan menguji keakuratan hasil interpretasi peserta sehingga peserta dapat melihat apakah pengukuran

yang mereka lakukan melalui komputer sesuai dengan pengukuran langsung di lapangan.



▲ Peserta turun ke lapangan untuk melihat apakah hasil pemetaan yang dilakukan di ruang kelas sudah sesuai kenyataan

▲ Para peserta menyempatkan diri foto bersama

## Masyarakat Adat Asing Bertemu di Sulawesi Tengah



▲ Beberapa peserta dari Kenya dan Peru di antara peserta Indonesia dalam forum diskusi

Pada tanggal 26 Juli 2011 Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah mendapat kunjungan masyarakat adat dari Kenya, Nepal, Peru, Philippines, dan Viet Nam. Kegiatan ini didukung oleh Sub Pokja IV (Bidang Peningkatan Kapasitas Provinsi dan Masyarakat untuk konsepsi Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC)) bekerja sama dengan Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sulawesi Tengah. Tujuan kunjungan masyarakat adat dari beberapa negara ini adalah mempelajari proses multipihak yang dibangun Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

Mirna Susana Setra dari AMAN, sebagai penanggung jawab kunjungan masyarakat adat, menjelaskan bahwa masyarakat adat sekarang ini umumnya sudah terlibat dalam forum internasional khususnya yang membicarakan tentang perubahan iklim. Pada saat ini di seluruh dunia, baru beberapa negara yang memiliki Pokja REDD+. Fakta bahwa Pokja REDD+ di Sulawesi Tengah sudah terbentuk dengan proses dan beranggotakan multi pihak, mendorong Yayasan Tebtebba (Pusat Internasional Masyarakat Adat untuk Riset Kebijakan dan Pendidikan atau *Indigenous Peoples' International Centre for Policy*

*Research and Education*) dari Philippines untuk menyelenggarakan kunjungan tersebut. Diharapkan melalui kegiatan

ini masyarakat adat dari lima negara itu belajar tentang model-model kerja sama dan konsep lokal pelestarian hutan. Selain dihadiri oleh anggota Pokja, kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa lembaga swadaya masyarakat di Sulawesi Tengah (a.l: Yayasan Tanah Merdeka, Kontras, Telapak), serta mahasiswa Universitas Tadulako, Palu.

Hal-hal yang menarik minat masyarakat adat asing pada pertemuan itu antara lain keterlibatan masyarakat adat di Pokja REDD+, model Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (*Free, Prior and Informed Consent* atau FPIC) yang rancangannya difasilitasi UN-REDD Programme Indonesia, hak-hak masyarakat adat di Sulawesi Tengah, dan posisi masyarakat adat dalam perdagangan karbon.



▲ Suasana diskusi kunjungan masyarakat adat asing dengan perwakilan AMAN di Palu

## Indikator Khusus Gender Menjadi Bagian dari UN-REDD Programme Indonesia

*"It is impossible to realize our goals while discriminating against half the human race"*

*"Kita tidak mungkin mencapai tujuan jika mendiskriminasi sebagian umat manusia"*

*(Kofi Annan, 2006)*

Selama dua hari (30 Juni - 1 Juli 2011) di Ciawi, UN-REDD Programme Indonesia mengikuti Pelatihan Gender dan Pengembangan Indikator Khusus Gender. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Unit Lingkungan UNDP Indonesia dan merupakan bagian dari koordinasi antar-proyek Unit Lingkungan UNDP Indonesia.

Pelatihan dan penyusunan indikator khusus gender ini diselenggarakan untuk membekali pengelola proyek dengan konsep dan analisa gender yang dapat dipergunakan untuk memperbaiki kinerja proyek melalui perbaikan dokumen yang telah disusun sebelumnya. Hal ini disebabkan pengarusutamaan gender dan kegiatan khusus gender di setiap proyek akan sangat mempengaruhi kesuksesannya. Dengan mempergunakan konsep dan analisa gender yang diberikan di



▲ Peserta pelatihan dari UN-REDD Programme Indonesia, UNDP Indonesia, dan proyek-proyek Unit Lingkungan UNDP Indonesia berfoto bersama

dalam pelatihan, UN-REDD Programme Indonesia berhasil mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok perempuan, yaitu keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya hutan. Keterlibatan dan tingkat keaktifan perempuan masih sangat terbatas dalam kegiatan-kegiatan UN-REDD Programme Indonesia di Sulawesi Tengah.

Oleh sebab itu, UN-REDD Programme Indonesia akan melakukan berbagai upaya untuk memastikan pengarusutamaan gender menjadi bagian dari dokumen-dokumen

strategis REDD+ seperti Strategi Nasional REDD+. Di samping itu, UN-REDD Programme Indonesia akan mendorong Kelompok Kerja REDD+ Sulawesi Tengah untuk meningkatkan keterlibatan kelompok perempuan baik secara kualitas maupun kuantitas dalam setiap kegiatan REDD+ di Sulawesi Tengah. UN-REDD Programme Indonesia juga akan mengumpulkan data peran perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan sumber daya alam ketika melakukan inventarisasi hutan di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pengumpulan data sosial-budaya dalam pembaruan sistem inventarisasi hutan Indonesia.

### Kata Mereka



#### **Novia Indarti, S.Ant.**

Mahasiswa program S2 Antropologi, Universitas Gadjah Mada, yang bekerja dengan masyarakat lokal Sulawesi Tengah terkait REDD+:

"Komitmen UN-REDD Programme Indonesia untuk berusaha mencari media komunikasi yang tepat dalam memberikan informasi pada masyarakat lokal dan masyarakat adat dapat membantu mereka mengetahui dan memahami program REDD+ dengan lebih baik."

## Kabar UN-REDD Programme Indonesia

Bagi semua yang merayakan hari kemenangan di akhir bulan puasa tahun ini,

**selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah**

dari keluarga besar UN-REDD Programme Indonesia.



▲ Ira Ratnasari

Dari tim Programme Management Unit (PMU) UN-REDD Programme Indonesia, kami memiliki kabar gembira sekaligus haru karena kehilangan satu rekan. Ira Ratnasari, yang telah bergabung sebagai Assistant to Team Leader Output 2 (Bidang Penerapan Metodologi) sejak Maret 2011, meninggalkan tugasnya untuk mengemban ilmu lebih lanjut. Ira akan mengambil program Master in Tropical and International Forestry di Georg-August-Universität Göttingen, Jerman, dari bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Juni 2013. Untuk mempersiapkan studinya yang dibiayai oleh program Uni Eropa itu, Ira meninggalkan PMU pada bulan September 2011. Selamat jalan Ira, selamat menuntut ilmu!

Terjadi pergantian posisi pada pengelolaan UN-REDD Programme Indonesia. Sejak bulan Juli 2011, Anton Sri Probiyantono, staf UNDP Indonesia, menggantikan Verania Andria sebagai Programme Manager UNDP untuk UN-REDD di Indonesia. Verania Andria kini menangani program *Renewable Energy and Energy Efficiency* di UNDP.

Anton Sri Probiyantono ►



▲ Keiko Nomura

Selain itu, mulai pertengahan Agustus 2011, Silje Haugland melepaskan posisinya sebagai Programme Officer untuk UN-REDD di Unit Lingkungan UNDP, digantikan oleh Keiko Nomura. Silje meninggalkan Indonesia untuk menempati posisinya sebagai Programme Officer untuk Global UN-REDD Programme di New York, Amerika Serikat. Terima kasih kepada Silje atas kerja samanya selama ini, selamat mengemban tugas baru.

Silje Haugland ►



### Hubungi kami :

Gedung Manggala Wanabakti  
Blok IV, Lantai 5, Ruang 525C  
Jalan Jenderal Gatot Subroto  
Jakarta 10270  
Telepon: +62 21 5795 1505  
Faks: +62 21 574 6748

atau silakan kirim e-mail ke:

[nanda.febriani@un-redd.or.id](mailto:nanda.febriani@un-redd.or.id)

Kerja sama antara:



**UN-REDD**  
PROGRAMME  
The United Nations Collaborative Programme  
on Reducing Emissions from Deforestation and  
Forest Degradation in Developing Countries



Untuk informasi lebih lanjut tentang  
**UN-REDD Programme Indonesia**  
kunjungi : [www.un-redd.or.id](http://www.un-redd.or.id)